

BAB IV

MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN MANUSIA DALAM TELAAH

ANTROPOLOGI METAFISIK NICOLAUS DRIYARKARA

4.1 Kemerdekaan Manusia Dalam Perspektif Antropologi Nicolaus Driyarkara

4.1.1 Secara Persona

Dalam antropologinya, Driyarkara menempatkan manusia sebagai pribadi. Manusia itu sendiri adalah pribadi karena merupakan suatu perpaduan yang istimewa antara jiwa dan badannya. Manusia tidak hanya merupakan benda material saja yakni badan, namun pada saat yang sama manusia juga adalah roh.¹²²

Jiwa dan badan yang merupakan prinsip roh dan materi yang ada dalam diri manusia ini bukanlah dua barang yang ada dan ditambahkan pada diri manusia. Tetapi seluruh diri manusia itu adalah jiwa (roh) dan seluruh diri manusia itu pula adalah badan (materi).¹²³ Jiwa dan badan ini merupakan dua prinsip yang saling berlawanan. Dan karena itu manusia memiliki oposisi-oposisi dalam dirinya. Inilah paradoks yang pertama dan terdalam dalam diri manusia. Ia adalah kesatuan. Kesatuan dari dua prinsip yang berlawanan,¹²⁴ yakni jiwa dan badan.

Ada pula prinsip yang mendasari sifat-sifat manusia sebagai roh-badan. Susunan sifat manusia itu pertama-tama adalah roh. Maka, manusia pertama-tama adalah roh. Akan tetapi manusia bukan roh yang melulu sebagai roh. Ia adalah roh yang bermateria. Roh yang berwujud barang material. Dan materi itu sendiri adalah perwujudan dari roh. Dan demi kematerialannya ini, manusia berada dalam waktu dan tempat.¹²⁵

¹²² Driyarkara, *Driyarkara tentang Manusia, Op. Cit.*, hlm. 20.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 16-17.

Ada dalam ruang dan waktu berarti ada dalam kesadaran. Menyadari diri berarti mampu berhadapan dengan diri sendiri. Kita pahami di sini manusia itu memiliki dirinya sendiri. Memiliki diri, berarti pula manusia bersemayam atas diri sendiri. Namun bersemayam di sini tidak hanya berarti *berada di*, namun lebih dari itu ialah *bertakhta*. Bertakhta mengandung arti berkuasa, berdaulat.¹²⁶ Jadi bagi Driyarkara, menerima manusia sebagai persona, berarti menemukan manusia yang merdeka. Sebab kemerdekaan itu melekat secara eksistensial. Di sinilah letak keluhuran manusia sebagai pribadi.¹²⁷

Lebih lanjut, bagi Driyarkara, sebagai pribadi yang merdeka, manusia dapat menggunakan kedaulatannya untuk memburu kesempurnaan atau bahkan menjerumuskan dirinya sendiri dalam kejahatan. Ia akan disebut sebagai pribadi yang berkepribadian, apabila ia mampu menggunakan kekuasaannya untuk memburu kesempurnaan secara terus-menerus. Artinya bahwa sebagai sang pribadi, ia telah memegang kedaulatannya, menguasai diri sendiri, tetap tegak di tengah-tengah arus nafsu, dan godaan yang menawarkan kedurhakaan.¹²⁸ Hal ini berarti ia sebagai pribadi yang merdeka mengerti nilai-nilai yang baik yang lahir dari upaya penyempurnaan diri yang terus menerus.¹²⁹

Untuk dapat bertindak seperti demikian sebagai pribadi yang merdeka maka manusia harus mampu mengambil keputusan dalam setiap tindakannya. Manusia harus mampu memilih dan memutuskan untuk bertindak. Bagi Driyarkara, sebagai pribadi yang merdeka manusia akan mengambil keputusan untuk bertindak menurut dasar kodratnya yang lebih tinggi yakni roh. Rohlah yang menjadi dasar penetapan dalam perbuatan-perbuatan manusia.¹³⁰ Di sinilah inti bahwa sebagai pribadi yang merdeka ia telah memerdekakan dirinya karena bertindak atas kemauan roh. Rohlah yang menjadi “tuan” atas badannya. Sebab dengan bertindak atas keinginan roh, bagi Driyarkara sudah tentu setiap tindakan yang

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

¹²⁸ Driyarkara, *Driyarkara tentang Manusia, Op. Cit.*, hlm. 36.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

¹³⁰ *Ibid.*

manusia lakukan melibatkan pertimbangan, mengedepankan nilai kebaikan, menghidupkan otonomi dan selalu menyertakan tanggung-jawab.¹³¹ Inilah letak keluhuran manusia sebagai pribadi merdeka yang merdeka. Jadi, manusia sebagai pribadi yang merdeka berarti ia akan berusaha sebisa dan sedapat mungkin untuk tidak pernah merendahkan martabatnya sebagai persona yang merdeka ke dalam keinginan tubuh (materi).

4.1.2 Secara Ada-Bersama

Konsekuensi yang jelas dari memerdekakan diri sebagai pribadi yang luhur untuk mengejar kesempurnaan akan terwujud dalam relasi ada-bersama. Inti dalam ada-bersama ini dalam upaya memerdekakan manusia ada dalam tesisnya manusia adalah kawan bagi yang lainnya (*homo homini socius*) untuk melawan argumen dari Hobbes yang menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi yang lainnya (*homo homini lupus*).

Driyarkara memandang manusia sebagai persona. Dari uraian di awal tentang persona, dapat dikatakan bahwa manusia senantiasa ada bersama dengan yang lainnya. Ia tidak akan tinggal dan hidup sendirian saja. Sebaliknya, manusia akan selalu berada bersama dan berhubungan dengan realitas di sekitar hidupnya. Manusia itu akan baru dapat mengalami dirinya sebagai aku ketika berhadapan dengan engkau. Hubungan aku-engkau ini membawa manusia pada kesatuan dengan yang lain. Itulah yang menjadi titik tolak berada manusia disebut sebagai ada-bersama.

Driyarkara menegaskan bahwa berada manusia diartikan aktif mengada, di mana mengada ini identik dengan aktivitas. Berada itu tidak dapat dipisahkan dari aktivitas.¹³² Hal ini dimaksudkan bahwa aktivitas merupakan cara manusia dalam membangun dunianya, bahwa ia membudaya. Ia menciptakan dunianya, dunia-budaya, bahasa, teknik, etika, sosial, dan lain sebagainya. Aktivitasnya itu dibangun dengan dirinya dan sesamanya yang lain

¹³¹ Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia Upaya Membangkitkan Humanisme*, *Op. Cit.*, hlm. 78-79.

¹³² Driyarkara, *Sosialitas sebagai Eksistensial*; dalam A. Sudiardja, S.j., dkk., *Op. Cit.*, hlm. 671.

dalam suatu komunikasi. Sehingga dunia manusia hanya merupakan dunia manusia karena komunikasi. Namun komunikasi yang dibangun itu atas dasar cinta kasih yang mendalam.

Dalam ada-bersama dengan persona yang lainnya, manusia tidak sedang mengkap objek, melainkan berhadapan dengan subjek terhadap subjek yang sama martabatnya.¹³³ Di sinilah, cinta kasih benar-benar dimanifestasikan. Inilah yang menjadi poin penting dari kemerdekaan manusia dalam ada-bersama. Bahwa pribadi itu makin tinggi kesempurnaannya makin sempurna juga kesatuannya dengan pribadi lain dalam ikatan cinta kasih. Dari kenyataan ini, Driyarkara kembali hendak menegaskan bahwa manusia adalah persona yang harus dihargai atau dihormati sebagai sesama dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama itu manusia saling memikirkan, saling menyumbangkan diri, saling bergaul, dan berkomunikasi dengan penuh cinta. Dalam kehidupan bersama, yakni ada-bersama ini, nilai-nilai kemanusiaan harus benar-benar dihidupkan. Sehingga manusia dalam ada-bersama, ia memperlakukan dan juga diperlakukan setara sebagai manusia. Namun bila hal ini tidak terjadi maka itu adalah bentuk perendahan terhadap martabat manusia dan sudah tentu secara implisit mengandung arti sebagai tindakan penjajahan atas kemerdekaan manusia.

Hal inilah yang diperjuangkan Driyarkara dalam pemikirannya terkait kemerdekaan manusia. Bahwa kemerdekaan manusia dalam ada-bersama itu sesungguhnya menjalin suatu komunikasi dengan persona yang lain dalam ikatan cinta tanpa ada tindakan-tindakan yang menciderai harkat dan martabat pribadi sendiri maupun pribadi yang lain. Bahwa dalam sosialitas atau ada-bersama tersebut, manusia harus benar-benar hadir bagi persona yang lain sebagai kawan (*homo homini socius*), bukan sebagai lawan (*homo homini lupus*). Sehingga manusia tidak akan memandang orang lain sebagai musuh dan saingan bagi dirinya tetapi ia akan memandang serta mengangkat harkat dan martabat orang lain sama seperti dirinya dan menjadikan orang lain sebagai sesamanya. Pernyataan ini dengan sendirinya akan menolak

¹³³ *Ibid.*, hlm. 684.

segala bentuk diskriminasi terhadap orang lain sebagai suatu bentuk penjajahan yang baru tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri orang lain. Di sini, dalam sosialitas, ada-bersama ini, cinta kasih harus benar-benar nyata dan menjadi jiwa dari segala perbuatan yang hendak dilakukan. Sebab dengan cinta kasihlah, perikemanusiaan diwujudkan.

4.2 Telaah Persoalan Ketidakadilan Dan ketidakadaban Dalam Periodisasi Perkembangan Pembangunan Dalam Bidang Sosial – Politik Di Indonesia

Keluhuran sebagai manusia terletak pada kedaulatan manusia atas diri sendiri, terletak pada kemerdekaannya sebagai pribadi yang merdeka. Implementasi kemerdekaan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sudah tentu menjadi kewajiban yang membiasa dalam keseharian hidup bangsa ini dan sudah tentu harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan untuk memperhatikannya.

Namun dalam perjalanan berdirinya negeri Indonesia sampai saat ini, banyak persoalan-persoalan ketidakadilan dan ketidakadaban yang sering terjadi yang sebenarnya telah menciderai harkat dan martabat setiap pribadi warga negara sebagai persona yang merdeka. Selain lahir dari masyarakat sipil, justru negara sebagai pelindung, pemerhati dan pejuang harkat dan martabat masyarakat juga ikut menjadi dalang dari persoalan-persoalan tersebut. Untuk itu, dalam membahas topik pada bagian ini, penulis membatasi diri pada beberapa persoalan-persoalan moral dalam bidang sosial-politik, khususnya dalam kasus-kasus ketidakadilan dan kekurangadaban yang dilakukan oleh negara atau juga sekelompok masyarakat sipil yang disadari atau tidak telah menciderai harkat dan martabat warga negara sebagai pribadi yang merdeka, untuk secara garis besar memberikan sedikit gambaran tentang perjalanan kemerdekaan manusia secara eksistensial dari masa ke masa di negeri ini dalam bidang sosial-politik. Penulis akan memulai membahasnya dari pemerintahan era Orde Lama sampai era Orde Reformasi.

4.2.1 Orde Lama

Pada masa Orde Lama ini, masalah-masalah ketidakadilan dan berbagai persoalan ketidakadaban dikonsentrasikan pada masa Demokrasi Terpimpin yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959-1966 setelah dikeluarkan Dekrit Presiden sampai dengan kejatuhannya.¹³⁴

Pengangkatan Soekarno menjadi “Presiden Seumur Hidup” oleh MPRS menjadi dalang dari sekian banyak persoalan yang terjadi pada waktu itu. Banyak kebijakan politik yang diambil Soekarno bukanlah demi kepentingan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya berkonsentrasi pada pelanggaran *status quo*. Intervensi Soekarno dengan politik kekuasaannya telah merambah sampai pada legislatif dan yudikatif. Konsekuensinya, ketidakadilan distributif merajalela karena dominasi kepentingan Presiden. Akibat terjalnya, kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi terpuruk. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu sangat rendah. Inflasi mencapai 650% membuat harga barang melambung tinggi, rakyat kelaparan dan menderita.¹³⁵ Kebangkrutan dari ekonomi tidak dapat dikendalikan, sehingga masyarakat mengalami kesulitan hidup, kemiskinan, dan kriminalitas.¹³⁶

Dalam problematika moral masa kepemimpinan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpinnya ini, membuktikan bahwa nilai kemerdekaan manusia yang diangkat oleh Driyarkara tidak mendapat aktualisasinya. Hak untuk memperoleh hidup yang lebih baik diabaikan negara. Kemiskinan dan kesenjangan hidup yang dialami masyarakat pada masa ini, menunjukkan bahwa negara gagal dalam upaya menciptakan kebaikan bersama (*bonum*

¹³⁴ Ketut Sedana Arta dan I Ketut Margi, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Orde Reformasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 142.

¹³⁵ Giovanni Aditya Lewa Arum, “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif S. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”, (*Skripsi*), (Kupang: UNWIRA, 2016), hlm. 133.

¹³⁶ Hartuti Purnaweni, “Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa”, (*Jurnal Administrasi Publik*), (Semarang: Administrasi Publik UNDIP, 2004), hlm. 120.

commune). Negara tidak bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan melainkan bertindak sebagai “penjajah baru” bagi masyarakat.

Pemerintah yang hanya mengejar kepentingan egoistik demi pelanggaran *status quo* tanpa disadari telah menjajah masyarakat dalam bentuk kemiskinan, kriminalitas dan lain-lain. Di sini seperti yang diutarakan oleh Driyarkara, adanya pertimbangan rasional sebelum mengambil keputusan yang selalu mengedepankan nilai kebaikan tidak diperhatikan oleh negara.¹³⁷ Konsekuensinya kebijakan-kebijakan dengan tujuan pembangunan justru merendahkan dan menciderai nilai-nilai yang ada dalam rakyat. Dalam hal ini, negara bukan lagi menjadi sarana perwujudan kebaikan bersama (*bonum commune*) bagi masyarakat, melainkan telah menjadi penjajah baru bagi masyarakat.

4.2.2 Orde Baru

Setelah Orde Lama berakhir, Indonesia memasuki suatu babak baru dalam periodisasi pemerintahan yakni, Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik.¹³⁸

Di sinilah kemudian terjadi proses penyingkiran corak egaliter dan demokratik dari budaya bangsa Indonesia dan kemudian digantikan oleh corak feodalistik, yang dimungkinkan karena dua hal pokok, *pertama*, melalui integrasi, pembersihan, dan penyatuan birokrasi negara dan militer di bawah satu komando. *Kedua*, penguatan negara qua negara

¹³⁷ Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia Upaya Membangkitkan Humanisme, Op. Cit.*, hlm. 78-79.

¹³⁸ Hartuti Purnaweni, *Op., Cit.*, hlm. 120.

juga dilakukan upaya penyingkiran politik massa. Partisipasi politik yang terlalu luas dan tidak terkontrol, dianggap dapat membahayakan stabilitas politik yang merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keterlibatan negara melalui aparat birokrasi dan militer diabsahkan hingga menjangkau ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹³⁹ Pada poin inilah militer menjadi pelaku utama dalam pentas perpolitikan negara dengan konsep dwifungsinya yakni mempertahankan eksistensi negara dengan bertempur dan memenangkan perang juga menjaga serta menciptakan suatu suasana yang kondusif dalam masyarakat agar kehidupan masyarakat dapat terbina dengan baik.¹⁴⁰

Namun dampak yang timbul dari hal tersebut ialah munculnya berbagai kekerasan, ketidakadilan dan ketidakadaban di tiap daerah di Indonesia. Hal ini diakibatkan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa militer. Banyak peristiwa kekerasan yang kontroversial terjadi pada masa Orde Baru dengan keterlibatan penuh dari pihak Militer yakni peristiwa Malari (15 Januari 1974), Peristiwa Penembakan Miterius (PETRUS) (tahun 1980-an), peristiwa OPK di Semarang, Jakarta dan kota lainnya (1983-1985) dan Peristiwa Trisakti (12 Mei 1988).¹⁴¹ Di samping itu juga telah ada peristiwa-peristiwa lain yang mendahului peristiwa-peristiwa tersebut juga ada yang terjadi setelah peristiwa-peristiwa tersebut.

Setahun menyelami kekerasan, Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) menyimpulkan enam pola kekerasan yang terjadi pada empat dasawarsa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden, yakni, pembasmian, kekerasan dalam perampasan sumber daya alam, penyeragaman dan pengendalian, kekerasan antarwarga, kekerasan

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

¹⁴⁰ Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 65.

¹⁴¹ Ketut Sedana Arta dan I Ketut Margi, *Op. Cit.*, hlm. 167-176.

terhadap perempuan dan kebuntuan hukum.¹⁴² Dari keenam pola kekerasan tersebut, KKPK coba memberikan suatu estimasi terkait jumlah korban yang meninggal khusus dari satu pola saja yakni pembasmian yang dirangkum dari berbagai sumber: kopkamtib, Badan Reintegrasi Aceh, dan CAVR. Estimasi jumlah korban Pembasmian yang meninggal sebanyak 620.000 – 1.220.000 korban yang meninggal dengan perinciannya sebagai berikut, *pertama*, peristiwa Pembantaian anggota, simpatisan dan semua yang terkait dengan PKI (1965-1966): 500.000 – 1.000.000. *Kedua*, Operasi Militer di Papua (1960an-1989): 20.000. *Ketiga*, Operasi Militer di Aceh (1989-2005): 20.000. *Keempat*, Pendudukan di Timor-Leste (1974-1999): 80.000-120.000.¹⁴³ Itulah sekelumit fakta kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

Politik dengan wajah kekerasan yang dilakukan selama masa Orde Baru oleh negara adalah bentuk penjajahan baru yang jauh lebih menyiksa bagi masyarakat Indonesia yang notabenehnya secara politis telah dibebaskan dari bangsa penjajah. Kepemimpinan yang otoriter tanpa memperhatikan yang lain selama masa Orde Baru dengan jargon politik “stabilitas nasional” sebenarnya tak lain ialah karena ketamakan kekuasaan dari pemimpin negara. Karenanya segala macam cara dibenarkan untuk “memuluskannya” dalam memimpin dan menguasai. Sang pemimpin lebih mementingkan keinginan materi (badan) dari pada keluhuran roh (jiwa) dalam setiap tindakan politisnya.

Driyarkara menegaskan bahwa untuk dapat menghargai harkat dan martabat pribadi dan orang lain sebagai persona yang merdeka, segala bentuk keinginan materi (badan) harus “disublimasi”, dijunjung ke kesempurnaan roh.¹⁴⁴ Sehingga setiap tindakan yang dibuat,

¹⁴² KKPK (Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran), *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas*, (Jakarta: KKPK, 2014), hlm. 33-34.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁴⁴ Driyarkara, *Driyarkara tentang Manusia, Op., Cit*, hlm. 43.

hasilnya tetap menjadikan diri dan juga orang lain sebagai pribadi yang luhur, sebagai *homo homini socius* bukan sebagai *homo homini lupus*.¹⁴⁵

Akibatnya, politik kekerasan dengan jargon “stabilitas nasional” era Orde Baru pun berakhir dengan pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998¹⁴⁶ atas desakan dari berbagai elemen, khususnya dari mahasiswa karena telah terjadi berbagai krisis di bidang politik, sosial dan ekonomi di dalam negeri.

4.2.3 Orde Reformasi

Pada era Orde Reformasi yang dimulai dari masa kepemimpinan Presiden B. J. Habibie, Indonesia mulai memasuki masa yang demokratis. Inisiatif politik yang awalnya muncul pada akhir-akhir era Soeharto yang dimotori oleh Amien Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita tersebut memberikan secerca harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan *booming* munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan lain sebagainya, yang merupakan ciri-ciri demokrasi. Muncul tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi demokrasi. Ada 3 alasan munculnya optimisme semacam ini yakni, *pertama*, meluasnya antusiasme terhadap reformasi. *Kedua*, kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggung jawaban yang meresapi sistem politik, sehingga reformasi demokratis diyakini merupakan solusi. *Ketiga*, perpecahan di kalangan elite politik yang berkuasa.¹⁴⁷

Namun dalam perjalanan waktu hingga saat ini, dibalik dinamika reformasi yang berakselerasi tinggi, nampaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi. Sekali pun

¹⁴⁵ Dr. Mudji Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁴⁶ Ketut Sedana Arta dan I Ketut Margi, *Op. Cit.*, hlm. 182.

¹⁴⁷ Hartuti Purnaweni, *Op. Cit.*, hlm. 121-122.

berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk, namun di sana-sini paradoks demokrasi masih banyak dijumpai.¹⁴⁸

Hingga saat ini, setidaknya tercatat berbagai paradoks yang patut dikritisi. *Pertama*, berkembangnya kekerasan politik, anarki, radikalisme, percekocokan massal yang sering dilanjutkan dengan adu fisik secara kolektif, pemaksaan kehendak, dan berbagai perilaku penyimpangan lainnya yang justru mencerminkan perilaku anti demokrasi.

Kedua, berkembangnya konspirasi politik yang sangat pragmatis dengan mereka yang dulu anti demokrasi, yang diwarnai dengan semangat kental hanya sekedar demi meraih kemenangan pemilu tanpa menunjukkan komitmen serius dalam mengagendakan demokrasi.

Ketiga, demokrasi mulai dimasukkan hanya sekedar sebagai retorika politik ketimbang sebagai sebuah agenda politik. *Keempat*, ketika kultus individu yang diperagakan oleh rezim Soeharto dengan berbagai simbolnya dihujat keras untuk dihabisi, kini sebagian masyarakat politik malahan memperagakan simbolisasi-simbolisasi figur kepemimpinan yang membawa warna kultus individu dalam bentuk lain. Simbol-simbol budaya politik Orde Baru bahkan mulai dibangkitkan kembali, seakan merupakan potret kehidupan politik yang benar.¹⁴⁹

Memang benar adanya bahwa telah ditemukan banyak paradoks dari demokrasi di negeri ini sejak awal era Reformasi sampai saat ini. Kemiskinan merajalela, kesehatan masyarakat memprihatinkan, korupsi dalam kalangan elite politik yang menguras dana-dana sosial untuk masyarakat terus meningkat, tawuran atas dasar SARA berkembang, dan lain sebagainya.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 122-123.

Pada tahun 2007, prevalensi nasional gizi buruk anak balita di Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2007 adalah 5,4 persen, sedangkan gizi kurang pada anak-anak balita 133,0 persen. Artinya, setidaknya dua dari 10 anak Indonesia mengalami gizi kurang (gizi buruk). Gizi buruk di sini bukan sekedar kekurangpahaman orangtua tentang gizi makanan. Lebih dari itu, umumnya berakar dari ketidakmampuan orangtua menyediakan cukup makanan bagi anaknya. Hal ini erat hubungannya kemiskinan dan ketersediaan pangan.¹⁵⁰

Lain hal lagi, pada tahun 2009 penelitian oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, kasus korupsi yang paling besar selama tahun itu adalah korupsi dana bantuan sosial (bansos) dengan total merugikan negara Rp. 215. 57 miliar, di mana kasus yang paling menyedot perhatian ialah kasus dugaan korupsi pengadaan sarung, mesin jahit, dan sapi impor di Kementerian Sosial pada tahun 2004-2006, yang menyeret mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Bantuan untuk rakyat miskin ternyata dikorup hingga senilai Rp. 38, 6 Miliar.¹⁵¹

Di sini, ketidakmampuan negara untuk menjamin kesejahteraan bagi masyarakat sangatlah bertolak dengan pemikiran Driyarkara dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan manusia. Bagi Driyarkara, manusia merupakan keutuhan jiwa-badan. Tindakan humanitas yang tertinggi ialah ketika kematerialan disublimasikan ke dalam kesempurnaan roh sebab kerohanianlah yang menjadi pertama dalam strukturnya, sehingga yang lahir dari tindakan manusia itu ialah suatu tindakan yang luhur dan manusiawi

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara, pemaksaan kehendak dari pihak tertentu, anarki, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan menelantarkan orang lain sebenarnya telah menciderai harkat dan martabat dari diri

¹⁵⁰ Atika Walujani Moedjiono, "Hidup Lebih Lama, Tetapi Apakah Sejahtera?", dalam *Merajut Nusantara Rindu Pancasila*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 47.

¹⁵¹ Ahmad Arif, "Korupsi Kemanusiaan, Kemanusiaan yang Terkorupsi, dalam *Merajut Nusantara Rindu Pancasila, Op. Cit.*, hlm. 67.

mereka sendiri sebagai pelaku dan orang lain sebagai korban. Karena ketamakan dalam bertindak dengan lebih menememptakan prinsip kematerialan dalam posisi tertinggi untuk bertindak, mereka (para pelaku) telah menodai dirinya sebagai pribadi yang tak manusiawi dan sedang memperkosa dirinya sendiri. Di samping itu juga, mereka telah bertindak sebagai lawan bagi sesamanya (*homo homini lupus*), karena tindakannya justru semakin merendahkan martabat orang lain.

4.3 Relevansi Pemikiran Antropologi Metafisik Nicolaus Driyarkara Tentang Kemerdekaan Manusia Dalam Upaya Menegakkan Keadilan Dan keadaban Dalam Bidang Sosial-Politik Di Indonesia Dewasa Ini

4.3.1 Sinkronisasi Pemikiran Antropologi Metafisik Nicolaus Driyarkara Dan ‘Manusia Pancasila’ Dalam Sila Ke-2 Pancasila, ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’

Penulis melihat bahwa *das sollen* Driyarkara dalam pemikiran filosofisnya akan manusia dan upayanya untuk memperjuangkan kemerdekaan manusia memiliki kesamaan yang mendasar dengan konsep manusia dalam Pancasila yang merupakan dasar negara, filsafat dan asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam sila ke-2 Pancasila yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam sila ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’, unsur-unsur hakikat manusia adalah sebagai berikut, *pertama susunan kodrat* manusia yang terdiri atas:

- Raga yang terdiri atas; unsur benda mati, unsur binatang (*animal*), dan unsur tumbuhan (*vegetatif*).

Raga: yaitu badan badan atau tubuh manusia yang bersifat kebendaan, dapat diraba, bersifat real, yang terdiri atas *material kebendaan*, yaitu unsur manusia yang bersifat fisis anorganis yaitu unsur yang terdapat pada benda mati

yaitu gejala fisis dan kimiawi. *Unsur tumbuhan*, hal ini dimaksudkan menyangkut unsur hakikat manusia, yang hakikatnya sebagaimana dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Unsur-unsur yang ada pada manusia, yang mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala seperti yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Antara lain gejala tumbuhan dan berkembang biak dari kecil menjadi besar, serta mempunyai kemampuan memperbanyak diri. Induk pohon, benih, tunas yang kemudian berkembang menjadi tumbuhan baru. Gejala ini tidak terdapat pada benda mati. *Unsur binatang*, yaitu unsur-unsur ada pada ciri manusia mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala sebagaimana yang terdapat pada binatang. Sifat-sifat dan gejala-gejala ini tidak dipunyai oleh benda mati maupun tumbuhan. Sifat-sifat yang terdapat semisal, berkeinginan, berinsting, dapat menyesuaikan diri dengan tempat dan lingkungan fisis, bernafsu yaitu tertarik pada sesuatu yang nikmat, dan sebagainya.

Berdasarkan hakikat unsur raga yang dimiliki oleh manusia, maka manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk alamiah (*naturwesen*), yang merupakan bagian dari alam dan oleh karena itu memiliki sifat-sifat dan tunduk kepada hukum yang alamiah pula. Kesadaran dan kesatuan manusia dengan alam sedemikian kuat, sehingga tidak mengherankan jikalau, kehidupan alamiahnya tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan sosial-budayanya. Hal ini berarti bahwa memahami manusia haruslah kita tempatkan dalam konteks yang real dan konkrit. Oleh karena itu unsur dimensi materialitas ini adalah merupakan perspektif manusia yang bersifat real dan alamiah. Jadi pada akhirnya, memahami manusia berarti menempatkannya dalam konteks kehidupan yang nyata, dalam kaitannya dengan alam lingkungannya. Dalam pengertian inilah maka manusia harus senantiasa

membudayakan dirinya dan mensosialisasikan dirinya demi kelangsungan hidupnya dan meningkatkan harkat dan martabatnya.

- Jiwa yang terdiri atas; akal, rasa dan kehendak.

Jiwa, yaitu unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat kerohanian, tidak bersifat empiris, tidak kongkret, tidak berwujud, tidak dapat diraba dan tidak dapat ditangkap oleh indra manusia. Dalam jiwa manusia terdapat tiga jenis unsur yaitu: *akal*, yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. *Rasa*, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia di bidang keindahan atau estetika. Misalnya kemampuan mengekspresikan seni, kreativitas di bidang estetika dan kemampuan-kemampuan keindahan lainnya, misalnya merasakan keindahan alam, indahnya cinta, dan lain sebagainya. *Kehendak*, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berhubungan dengan hasrat tingkah laku manusia oleh karena itu kehendak berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia untuk merealisasikan dan memperoleh kebaikan, kesusilaan. Jadi unsur kehendak manusia berkaitan dengan bidang etika, yaitu realisasi pada tingka laku manusia.

Kedua, **sifat kodrat** manusia terdiri atas:

- makhluk individu, yaitu manusia sebagai perseorangan memiliki sifat-sifat sendiri sebagai individu. Manusia sebagai individu adalah bersifat nyata, sebagai pribadi yang berupaya merealisasikan potensi pribadinya. Menurut Pancasila seorang manusia sebagai individu memiliki kebebasan, akan tetapi sebagai warga masyarakat, warga bangsa dan negara, warga manusia harus memenuhi tanggung jawab.

- Makhluk sosial, yaitu manusia selain sebagai individu perseorangan, juga menjadi masyarakat (makhluk sosial) manusia sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan senantiasa hidup di dalam masyarakat (sebagai warga masyarakat). Ia tidak dapat merealisasikan dan mengembangkan potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan manusia lain dalam masyarakat.

Individu dan masyarakat bukan dua realitas yang terpisahkan, melainkan dua sisi dari realitas yang satu, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Jadi manusia sebagai warga masyarakat adalah sekaligus sebagai individu, perseorangan.

Ketiga, kedudukan kodrat manusia terdiri atas:

- makhluk berdiri sendiri, yaitu manusia adalah otonom, berdiri sendiri, mempunyai eksistensi sendiri memiliki pribadi sendiri.
- makhluk Tuhan, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi manusia adalah berasal dari Tuhan di atas manusia masih terdapat Dhat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Jadi Tuhan adalah sebagai sebab pertama.¹⁵²

Unsur-unsur hakikat manusia tersebut, masing-masing merupakan kedua-tunggalan (*monodualis*), yaitu susunan kodrat manusia yaitu terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu raga-j jiwa, sifat kodrat manusia yang terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan yang Mahaesa. Keseluruhan unsur-unsur hakikat manusia pada hakikatnya mewujudkan suatu keutuhan (ketunggalan) jadi bersifat '*majemuk tunggal*' atau '*monopluralis*'. Dalam kenyataan hidup manusia tadi harus dijelmakan dalam suatu perbuatan lahir maupun batin yang seharusnya memenuhi

¹⁵² Prof. DR. H. Kaelen, *Negara Kebangsaan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 233-238.

ketunggalan (majemuk-tunggal) (monopluralis) tadi. Jadi agar manusia benar-benar sebagai manusia maka harus mampu menjelmakan unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat ‘monopluralis’ tadi dalam perbuatan lahir dan batin dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵³

Dari paparan di atas penulis melihat, pemikiran filosofis manusia dalam kaca mata Driyarkara dan Pancasila dalam sila ke-2, ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ mempunyai satu makna yang sama namun dibahasakan dengan term yang berbeda. Driyarkara juga memandang manusia sebagai kesatuan jiwa dan badan (monodualis) yang berdinamika. Di mana dinamika tersebut menghantar manusia untuk mengenal sesamanya dan Tuhan dalam ikatan cinta kasih yang termanifestasi dalam perikemanusiaan.¹⁵⁴

4.3.2 Moralitas Kemanusiaan Sebagai Jalan Keluar Upaya Memperjuangkan Kemerdekaan Manusia

Adanya kesamaan *das Sollen* pemikiran Driyarkara tentang manusia dan manusia dalam terang pemikiran Pancasila, khususnya sila ke-2, ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ dan kenyataan-kenyataan (*das Sein*) yang sudah dipaparkan dalam periodisasi perkembangan pembangunan di Indonesia di atas, penulis melihat bahwa Driyarkara dan ‘Manusia Pancasila’ sebenarnya ingin memberikan suatu jalan keluar akan buruknya moralitas kemanusiaan di Indonesia yang masih sering terjadi dewasa ini. Pemikiran-pemikiran filosofis dari keduanya ini mencoba menghantar manusia Indonesia untuk semakin menegakkan moralitas dalam keseharian hidup, demi terwujudnya kemerdekaan manusia yang hakiki.

Oleh karena itu, demi memperjuangkan kemerdekaan manusia, dalam perbuatan sehari-hari manusia harus senantiasa berpedoman pada suatu norma yang baik, agar

¹⁵³ Prof. DR. H. Kaelen, *Op. Cit.*, hlm. 238.

¹⁵⁴ Rumusan akan pemikiran Driyarkara tentang manusia telah dibahas pada BAB III Antropologi Metafisik Nicolaus Driyarkara pada hlm. 19.

terlaksananya nilai-nilai hakikat manusia. Dalam keadaan yang demikian ini manusia memiliki sifat dan watak yang luhur, yang sesuai dengan hakikat manusia sebagai Persona menurut Driyarkara dan hakikat manusia *monopluralis* menurut sila ke-2 Pancasila yang disebut tabiat saleh yang meliputi empat hal, yakni *Moral Kebijaksanaan*, yaitu sikap perbuatan manusia harus senantiasa merupakan hasil pertimbangan dari akal, rasa dan kehendak, secara selaras. Akal memberi pengetahuan tentang perbuatan yang bagaimana yang harus dilakukan, rasa mengujinya dengan berpedoman pada hasratnya (secara estetis), serta kehendak akan menentukan perbuatan tersebut akan dilakukan atau tidak (secara etis).¹⁵⁵

Moral Keadilan, di mana hakikat manusia sebagai persona yang merdeka harus terjelma dalam suatu perbuatan adil. Oleh karena itu dalam segala manifestasi perbuatannya manusia harus senantiasa bersifat adil yaitu suatu kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain secara semestinya yang menjadi haknya. Selain itu manusia merealisasikan moralitas keadilan yaitu relasi keadilan manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa/negara, manusia terhadap dirinya sendiri dan manusia terhadap Tuhannya.¹⁵⁶ Ini semua hanya dapat terjadi bila ada cinta yang nyata dari manusia. Cinta yang nyata itu akan termanifestasi dalam perikemanusiaan.

Moral kesederhanaan, di mana setiap perbuatan manusia harus bersifat sederhana yaitu harus menekan dan menghindari pelampauan batas (berkelebihan) dalam wujud kemewahan, kenikmatan atau hal-hal yang bersifat enak. Oleh karena itu hasrat *ketubuhan (jasmani)*, *kejiwaan (rohani)*, *hasrat individu* maupun *makhluk sosial* harus senantiasa saling

¹⁵⁵ Prof. DR. H. Kaelen, *Op.Cit.*, hlm. 244.

¹⁵⁶ *Ibid.*

membatasi diri agar tidak melampaui batas.¹⁵⁷ Hal ini hanya dapat terjadi apabila keinginan jasmani disublimasikan ke keinginan roh.

Watak keteguhan, yaitu kemampuan yang ada pada manusia untuk senantiasa memiliki keyakinan terhadap suatu kebenaran dan senantiasa meletakkan sebagai suatu pedoman dan acuan dalam sikap dan tindakannya, tentang kebenaran baik secara epistemologis maupun ideologis. Pedoman kebenaran itu terutama berkaitan dengan pandangan hidupnya dalam konteks berbangsa dan bernegara.¹⁵⁸

4.3.3 Pemaknaan Kritis Kehidupan Sosial-Politik Aktual Di Indonesia

4.3.3.1 Kritik Bagi Pribadi

Pemaknaan kemerdekaan manusia dalam terang pemikiran Nicolaus Driyarkara yang sejalan dengan pemikiran ‘manusia Pancasila’ kiranya dapat dipandang sebagai sebuah catatan kritis dan sekaligus sebagai sebuah wejangan besar bagi setiap pribadi untuk mampu mengaktualisasikan diri secara benar dalam setiap aktivitas hidupnya. Bahwa sikap manusia terhadap dirinya harus benar-benar diutamakan dalam setiap tindakan nyata, sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat dirinya sendiri.

Sebagai pribadi yang merdeka yang *monopluralis*, setiap tindakan yang dibuat oleh manusia seharusnya bukan merupakan suatu bentuk perendahan akan martabat dan harga dirinya sebagai pribadi. Melainkan setiap perbuatan yang dilakukan hendaknya selalu mengutamakan keluhuran nilai-nilai yang ada pada dirinya. Sehingga dari pada itu, tindakan-tindakan amoral yang sering terjadi seperti, pencurian, pemerkosaan, perkelahian, korupsi, dan lain sebagainya sebetulnya tidak perlu terjadi.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 244-245.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 245.

Driyarkara melihat bahwa tindakan-tindakan amoral yang sering terjadi seperti demikian karena, sebagai pribadi yang merdeka, manusia lebih mudah mengikuti kemauan dari prinsip kematerialan (tubuh) dari pada prinsip roh (jiwa). Seperti yang dinyatakan oleh Driyarkara bahwa kemerdekaan yang sempurna tidak akan dapat dicapai oleh manusia selama kematerialannya belum “disublimasi”, dijunjung ke kesempurnaan Roh.¹⁵⁹

4.3.3.2 Kritik Bagi Lembaga Pemerintahan

Sumbangsi pemikiran Nicolaus Driyarkara tentang kemerdekaan manusia yang sangat mendalam ini secara umum dapat menjadi kritikan bagi lembaga pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan yang notabene adalah tempat dan sarana untuk mensejahterahkan rakyat seringkali salah kaprah dalam mengambil keputusan politis yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan banyak orang yakni masyarakat. Ketidakmampuan para aparatur negara dan politisi di dalam lingkup pemerintah dalam mendayagunakan kemampuan akal budinya untuk memaknai tugas dan tanggung jawabnya dalam membuat setiap kebijakan publik akhir-akhir ini menjadi alasan yang paling mendasar, mengapa setiap kebijakan publik selalu menelantarkan masyarakat.

Perlu adanya pertimbangan nalar yang sehat dalam proses pengambilan keputusan sebelum bertindak menjadi hal prinsipil seperti yang diutarakan oleh Driyarkara di samping mengedepankan nilai kebaikan, menghidupkan otonomi dan menyertakan tanggung jawab.

Hemat penulis, setiap kebijakan politis dari pemerintah yang menelantarkan masyarakat merupakan suatu bukti nyata adanya indikasi “kepentingan pribadi” tanpa memperhatikan moral kesederhanaan (dengan ditemukan berbagai kasus korupsi di mana-mana. Dan satu-dua contohnya seperti yang telah dikemukakan di atas) dari aparatur negara

¹⁵⁹ Driyarkara, *Persona dan Personisasi, Op. Cit.*, hlm. 62.

dalam penyusunan kebijakan-kebijakan publik sehingga masyarakatlah yang menjadi korban dari keputusan yang “tidak sehat” tersebut. Kebijakan Ekonomi tidak sosial, pendidikan tidak sosial, kesehatan tidak sosial, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi sebab pemerintah tidak lagi dipandang sebagai lembaga “pensejahteraan” kehidupan masyarakat, namun justru menjadi penjajah baru yang justru dengan kebijakan-kebijakannya hadir sebagai serigala dan menciderai harakat dan martabat masyarakat.

Memang tak dapat dipungkiri juga bahwa kebijakan-kebijakan yang datang dari pemerintah semata-mata juga adalah untuk tujuan pembangunan. Namun haruslah diingat pula bahwa pembangunan yang diadakan semata-mata bukanlah untuk melayani kepentingan golongan yang berkuasa (pembangunan pragmatis), atau yang ditentukan oleh suatu teori nilai apriori (pembangunan ideologis). Hal ini bukanlah tujuan pembangunan yang benar. Namun pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah haruslah menjadikan manusia sebagai basis dan tujuannya. Pembangunan harus demi manusia itu sendiri sehingga selalu mengusahakan suatu masyarakat yang dibangun secara wajar tetapi tidak memperkosa manusia konkret atas nama cita-cita tentang manusia. Sebab tidak pernah suatu teori, suatu kebenaran abstrak, betapa pun indahnyanya, boleh menjadi dasar politik praktis. Ideologisasi macam itu selalu condong untuk mengorbankan manusia nyata demi pikiran sang ideolog tentang manusia dan oleh karena itu harus ditolak. Pembangunan harus sesuai dengan manusia yang konkret, dan bukan dengan bagaimana manusia seharusnya. Dalam mengarahkan pembangunan kita harus bertolak bukan dari pikiran kita, bukan dari pandangan moral atau agama kita, dan bukan dari ideologi kita melainkan dari harapan, aspirasi, keinginan, cita-cita manusia kongkret itu sendiri, dan dengan demikian baru pembangunan itu betul-betul demi manusia.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 42-43.

Adalah benar bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan dari pemerintah haruslah menjadi suatu upaya untuk mencapai *bonum commune* tetapi tanpa mengorbankan manusia. Artinya bahwa setiap kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat harus benar-benar sosial demi kesejahteraan banyak orang tanpa mengorbankan yang lain juga. Tentang hal ini, di akhir karangannya mengenai sosialitas, Driyarkara menyatakan, apakah artinya jika orang berkata bahwa ekonomi harus sosial, kesenian harus sosial, dan lain sebagainya? Artinya ialah bahwa hal-hal tersebut harus diatur, diselenggarakan, dan dijadikan bentuk-bentuk kehidupan yang sedemikian rupa sehingga mengangkat (mengkonstituir) sesama manusia sebagai *socius*.¹⁶¹

Maka dalam hal ini, pemerintah harus mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa kemerdekaan bukanlah keterjajahan dari bangsa asing lagi. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan lagi dalam artian politis semata, namun lebih dari itu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dewasa ini ialah suatu pembangunan di mana manusialah (masyarakat) yang menjadi sasaran atau tujuannya sesungguhnya demi mewujudkan *bonum commune*. Di mana sosialisme dalam terang pemikiran Driyarkara benar-benar nampak, yakni sistem masyarakat, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang secara eksplisit dan formal berpangkal pada kesosialan manusia. Karena kesosialan itu berdasarkan persona, maka tidak mungkin suatu bentuk sosialisme dipertanggungjawabkan jika tidak mengakui dasar tersebut.¹⁶²

4.3.3.3 Kritik Bagi Sosialitas Preman

Ada-bersama merupakan titik tolak pemikiran Driyarkara atas relasi sosial manusia. Manusia baru dapat mengalami dirinya sebagai aku ketika berhadapan dengan engkau. Hubungan aku engkau ini membawa manusia pada kesatuan dengan yang lain. Dengan

¹⁶¹ Driyarkara, *Sosialitas sebagai Eksistensialis*; dalam A. Sudiardja, Sj., dkk., *Op. Cit.*, hlm. 690.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 691.

demikian cara berada manusia disebut sebagai ada-bersama untuk hidup memasyarakat. Dalam kehidupan bersama tersebut manusia akan saling memikirkan, saling menyumbangkan diri, saling bergaul dan berkomunikasi dengan penuh cinta. Dalam kehidupan bersama ini, untuk mencapai hal-hal tadi, nilai-nilai kehidupan harus dihidupkan,¹⁶³ sehingga manusia benar-benar menjadi kawan bagi sesamanya (*homo homini socius*). Pikiran inilah yang menjadi senjata bagi Driyarkara untuk mengkritik sosialitas perman yakni sosialita yang mengerkah, memangsa dan saling membenci dalam *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya), yang hidup tanpa mengutamakan moral kebijaksanaan dan moral keadilan dalam setiap perbuatan hidupnya.

Pemaknaan kemerdekaan manusia dalam terang pemikiran Driyarkara kiranya menjadi kritik keras dan sekiranya dapat memangkas segala bentuk pelanggaran-pelanggaran moral yang senantiasa hadir dalam masyarakat yang justru sengaja dibuat oleh pihak-pihak atau elemen-elemen tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuk pelanggaran moral yang sering terjadi dalam masyarakat itu semisal, bentuk tawuran antar sekelompok orang yang berakibatkan kematian, penjarahan, pembunuhan, segala bentuk persekusi dan lain sebagainya.

Pribadi yang satu harus benar-benar memandang yang lainnya sebagai sahabat, kawan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan bersama (masyarakat) guna terus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama sebagai pribadi yang benar-benar merdeka.

¹⁶³ Adrianus Aloysius Mite Lamba, "Driyarkara: Ada Bersama sebagai Titik tolak Sosialitas", dalam *Jurnal Filsafat Wiweka*, (Surabaya: Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, 2016), hlm. 16.